

Dinamika identitas nasional Indonesia: Antara upaya integrasi nasional dan tantangan konflik horizontal

Aditya Vito Pramudya

Program Studi Manajemen, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: vitopramudya17@gmail.com

Kata Kunci:

Identitas nasional, integrasi, konflik horizontal, primordialisme, indonesia.

Keywords:

National identity, integration, horizontal conflict, primordialism, indonesia.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontradiksi antara upaya penguatan integrasi nasional dan meningkatnya tantangan konflik horizontal yang mengancam stabilitas identitas bangsa Indonesia. Sebagai negara dengan tingkat keberagaman yang tinggi, Indonesia terus berupaya merajut persatuan melalui konsensus ideologi Pancasila. Namun, dinamika sosial terkini menunjukkan bahwa identitas nasional seringkali berbenturan dengan penguatan sentimen primordialisme dan ego sektoral. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan, mengkaji berbagai literatur sosiologi politik serta data sekunder terkait konflik komunal dalam satu dekade terakhir. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa meskipun instrumen integrasi secara formal telah mapan, integrasi sosiologis di tingkat akar rumput masih menghadapi hambatan serius akibat politisasi identitas dan ketimpangan distribusi sumber daya ekonomi. Konflik horizontal yang muncul cenderung dipicu oleh manipulasi isu SARA dalam kontestasi politik yang memperlebar jarak antar kelompok. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan identitas nasional tidak cukup hanya dilakukan melalui pendekatan keamanan atau seremonial. Diperlukan reorientasi pendidikan karakter yang inklusif serta kebijakan publik yang mampu menjawab akar ketidakadilan sosial. Sinergi antara kearifan lokal dan nilai-nilai modern menjadi kunci dalam memitigasi potensi disintegrasi demi mewujudkan stabilitas nasional yang berkelanjutan di tengah keberagaman yang ada.

ABSTRACT

This study aims to analyze the contradiction between efforts to strengthen national integration and the rising challenges of horizontal conflicts that threaten the stability of Indonesian national identity. As a highly diverse nation, Indonesia continuously strives to weave unity through the ideological consensus of Pancasila. However, current social dynamics indicate that national identity often clashes with the strengthening of primordial sentiments and sectoral egos. The research method employed is descriptive qualitative with a literature review approach, examining various political sociology literatures and secondary data regarding communal conflicts over the past decade. The results show that while formal integration instruments are well-established, sociological integration at the grassroots level still faces serious obstacles due to the politicization of identity and inequality in the distribution of economic resources. Emerging horizontal conflicts tend to be triggered by the manipulation of ethnic, religious, and racial issues in political contests, which widens the gap between groups. The study concludes that strengthening national identity cannot be achieved solely through security or ceremonial approaches. An inclusive reorientation of character education and public policies capable of addressing the roots of social injustice are required. The synergy between local wisdom and modern values is key to mitigating the potential for disintegration and ensuring sustainable national stability amidst existing diversity.



Pendahuluan

Indonesia merupakan negara kepulauan yang dibangun di atas keberagaman suku, agama, ras, bahasa, budaya, dan pengalaman sejarah yang sangat kompleks. Keberagaman tersebut menjadi kekayaan sekaligus tantangan karena identitas nasional harus mampu merangkul berbagai identitas lokal tanpa menghapus ciri khas masing-masing kelompok. Identitas nasional dapat dipahami sebagai jati diri kolektif yang membedakan suatu bangsa dari bangsa lain, sekaligus menjadi dasar psikologis, sosial, dan politik bagi warga negara untuk merasa sebagai bagian dari satu komunitas kebangsaan (Faslah, 2024). Dalam konteks Indonesia, identitas tersebut tidak hanya berbentuk simbol seperti bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan, tetapi juga hadir dalam nilai Pancasila, semangat gotong royong, serta semboyan *Bhinneka Tunggal Ika*.

Persoalannya, identitas nasional tidak pernah bersifat selesai. Ia terus bergerak mengikuti perubahan sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Pada satu sisi, negara terus mendorong integrasi nasional melalui pendidikan, kebijakan publik, simbol kenegaraan, dan penguatan Pancasila. Pada sisi lain, masyarakat Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kesenjangan sosial, intoleransi, ujaran kebencian di ruang digital, dan menguatnya politik identitas. Anjani (2025) menegaskan bahwa globalisasi menuntut penguatan nilai Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, dan pelestarian budaya agar identitas nasional tetap kokoh di tengah perubahan zaman. Tantangan tersebut semakin serius ketika identitas primordial dimobilisasi dalam kontestasi politik sehingga perbedaan yang seharusnya menjadi kekayaan berubah menjadi sumber kecurigaan antarkelompok.

Konflik horizontal menjadi salah satu ancaman nyata terhadap integrasi nasional. Konflik seperti Ambon, Poso, Sampit, dan beberapa ketegangan berbasis SARA menunjukkan bahwa kohesi sosial dapat melemah ketika masyarakat kehilangan ruang dialog dan kepercayaan antarwarga. Khasani (2021) mengingatkan bahwa Indonesia dengan kekayaan kulturalnya memiliki potensi konflik horizontal, sehingga upaya menjaga persatuan harus selalu lebih maju daripada ancaman disintegrasi. Dalam konteks yang lebih baru, Arifin et al. (2025) menjelaskan bahwa politik identitas dan populisme dapat mengganggu kohesi nasional karena sentimen agama, etnis, dan kelompok sering dijadikan jalan pintas untuk memperoleh dukungan politik. Berdasarkan latar belakang tersebut, tulisan ini bertujuan untuk menganalisis dinamika identitas nasional Indonesia dalam hubungannya dengan upaya integrasi nasional dan tantangan konflik horizontal. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan. Sumber yang dikaji meliputi buku, artikel jurnal, dan laporan penelitian yang relevan, khususnya karya dosen UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang tersimpan di repository kampus. Pembahasan difokuskan pada tiga aspek utama, yaitu konsep identitas nasional, dinamika integrasi nasional, dan konflik horizontal sebagai ancaman terhadap persatuan bangsa.

Pembahasan

Identitas nasional Indonesia dapat dipahami sebagai hasil perjumpaan antara sejarah, budaya, ideologi, dan pengalaman kolektif bangsa. (Faslah, 2024) menjelaskan bahwa identitas nasional bukan hanya simbol pengenal, melainkan juga faktor strategis dalam menjaga keberlanjutan dan kedaulatan. Artinya, identitas nasional memiliki fungsi praktis dalam kehidupan berbangsa. Ia membantu warga negara mengenali dirinya sebagai bagian dari Indonesia, menumbuhkan rasa memiliki, dan membangun kesadaran bahwa perbedaan harus dikelola dalam satu ikatan kebangsaan. Tanpa identitas nasional yang kuat, masyarakat akan lebih mudah terpecah ke dalam kepentingan sempit berbasis suku, agama, daerah, atau kelompok politik.

Dalam konteks Indonesia, Pancasila memiliki posisi penting sebagai titik temu berbagai identitas sosial. (Faslah, 2024) menegaskan bahwa Pancasila bukan sekadar dasar negara secara formal, tetapi juga pedoman hidup berbangsa yang perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial dapat menjadi kerangka etis untuk menahan kecenderungan eksklusivisme kelompok. Karena itu, penguatan identitas nasional tidak cukup hanya dilakukan dengan menghafal simbol negara, tetapi perlu dihubungkan dengan praktik sosial, seperti menghargai perbedaan agama, menolak diskriminasi, dan mengutamakan kepentingan bersama.

Dinamika Integrasi Nasional: Upaya dan Tantangan

Integrasi nasional adalah proses menyatukan berbagai unsur masyarakat ke dalam satu kesatuan bangsa tanpa meniadakan keberagaman. Integrasi tidak berarti menyeragamkan seluruh warga negara, melainkan membangun kesediaan untuk hidup bersama dalam aturan, nilai, dan tujuan yang disepakati. Dalam hal ini, Bhinneka Tunggal Ika menjadi prinsip penting karena mengakui bahwa persatuan Indonesia dibangun dari kenyataan yang beragam. Integrasi nasional yang sehat tidak menekan identitas lokal, tetapi memberi ruang bagi budaya daerah, tradisi keagamaan, dan ekspresi sosial untuk hidup berdampingan selama tidak bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan persatuan. Upaya integrasi nasional telah dilakukan melalui berbagai instrumen formal, seperti pendidikan Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, kurikulum sejarah, peringatan hari nasional, dan kebijakan pemerataan pembangunan. Namun, instrumen formal tersebut belum selalu berhasil membentuk integrasi sosiologis di tingkat akar rumput. Hasba (2025) menekankan bahwa perkembangan teknologi informasi dan internet yang hampir tanpa batas teritorial menjadi tantangan serius bagi nasionalisme, identitas kebangsaan, dan kerukunan masyarakat. Dengan kata lain, integrasi nasional saat ini tidak hanya diuji di ruang fisik, tetapi juga di ruang digital, tempat hoaks, ujaran kebencian, dan provokasi identitas dapat menyebar dengan cepat.

Pendidikan kewarganegaraan memiliki peran strategis dalam menjembatani tantangan tersebut. Alim (2025) menjelaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan perlu menyiapkan generasi yang cerdas dan toleran, tidak hanya memahami hak dan kewajiban, tetapi juga mampu hidup harmonis dalam masyarakat yang semakin beragam. Pandangan ini sejalan dengan Umar (2022) yang menekankan pentingnya pendidikan kewarganegaraan berbasis multikultural untuk meneguhkan identitas

nasional di era disrupsi. Melalui pendekatan multikultural, peserta didik tidak hanya diajarkan tentang konsep persatuan, tetapi juga dilatih untuk berdialog, menghargai kelompok berbeda, dan menyelesaikan konflik secara damai.

Selain pendidikan, moderasi beragama juga menjadi elemen penting dalam integrasi nasional. Zuhroh et al. (2024) menemukan bahwa implementasi moderasi beragama yang memadukan nilai kebangsaan, keberagaman, dan dukungan teknologi digital dapat membentuk generasi muda yang toleran, nasionalis, dan cinta tanah air. Temuan ini menunjukkan bahwa integrasi nasional membutuhkan pendekatan dari bawah, yaitu melalui keluarga, sekolah, komunitas, organisasi keagamaan, dan ruang pertemuan sosial. Apabila masyarakat memiliki pengalaman positif dalam berinteraksi lintas kelompok, maka prasangka dapat dikurangi dan rasa percaya antarkelompok dapat diperkuat. Meski demikian, integrasi nasional tetap menghadapi tantangan struktural. Ketimpangan ekonomi, akses pendidikan yang tidak merata, dan perasaan diperlakukan tidak adil dapat melemahkan rasa kebangsaan. Identitas nasional akan sulit diterima sebagai ruang bersama apabila sebagian kelompok merasa hanya menjadi penonton dalam pembangunan. Karena itu, integrasi nasional tidak bisa dilepaskan dari keadilan sosial. Pancasila sebagai dasar negara menempatkan keadilan sosial sebagai sila kelima, sehingga persatuan harus dibangun bersama pemerataan kesempatan, pelayanan publik yang setara, dan kebijakan yang tidak diskriminatif.

Konflik Horizontal sebagai Ancaman Integrasi

Konflik horizontal adalah konflik yang terjadi di antara kelompok masyarakat yang berada pada posisi sosial relatif sejajar, misalnya konflik antarsuku, antaragama, antarkelompok, atau antarwarga. Berbeda dari konflik vertikal yang mempertemukan masyarakat dengan negara atau elite kekuasaan, konflik horizontal biasanya tumbuh dari relasi sosial sehari-hari yang memburuk. Pemicunya dapat berupa perebutan sumber daya, kesalahpahaman budaya, provokasi politik, ketidakadilan ekonomi, atau penyebaran informasi palsu. Pada titik tertentu, identitas kelompok menjadi penanda yang mempercepat perluasan konflik karena masyarakat mulai melihat pihak lain bukan sebagai sesama warga negara, melainkan sebagai lawan.

Dalam kajian identitas, konflik horizontal sering berkaitan dengan menguatnya primordialisme. Primordialisme adalah kecenderungan menempatkan ikatan asal-usul, suku, agama, atau kelompok sebagai identitas paling utama. Ikatan ini sebenarnya tidak selalu negatif karena dapat menjadi sumber solidaritas. Namun, ia menjadi berbahaya ketika digunakan untuk menolak kelompok lain, membenarkan kekerasan, atau membangun klaim bahwa satu kelompok lebih berhak atas ruang sosial tertentu. Arifin et al. (2025) menunjukkan bahwa politisasi identitas berbasis suku, agama, ras, dan antargolongan dalam kontestasi politik dapat merusak kohesi sosial karena perbedaan dijadikan alat mobilisasi dukungan.

Konflik horizontal juga dipengaruhi oleh lemahnya ruang publik yang mempertemukan warga secara setara. Ketika masyarakat hidup dalam lingkungan yang terpisah berdasarkan agama, kelas sosial, atau afiliasi politik, prasangka akan lebih mudah tumbuh. Media sosial memperkuat kecenderungan ini melalui ruang gema, yaitu situasi ketika seseorang hanya berinteraksi dengan informasi dan kelompok yang sejalan

dengan keyakinannya. Dalam kondisi seperti itu, perbedaan pandangan dapat dengan cepat berubah menjadi permusuhan. Putri et al. (2025) menekankan pentingnya dialog antargenerasi dan kritisisme konstruktif agar Pancasila tetap relevan dalam kehidupan sosial dan digital. Dialog semacam ini penting karena konflik tidak hanya diselesaikan melalui aturan, tetapi juga melalui pembiasaan untuk mendengar dan memahami.

Dampak konflik horizontal tidak berhenti pada kerugian fisik, seperti korban jiwa, kerusakan fasilitas, dan pengungsian. Dampak yang lebih panjang adalah rusaknya kepercayaan sosial. Masyarakat yang pernah mengalami konflik dapat membawa trauma kolektif dan kecurigaan antarkelompok selama bertahun-tahun. Kondisi ini menghambat pembangunan daerah, mengurangi kerja sama ekonomi, dan membuat warga sulit membayangkan masa depan bersama. Karena itu, penyelesaian konflik tidak cukup dilakukan dengan penghentian kekerasan, tetapi harus dilanjutkan dengan rekonsiliasi, pemulihan trauma, penegakan hukum yang adil, dan penciptaan ruang dialog yang berkelanjutan.

Strategi Penguatan Identitas Nasional

Penguatan identitas nasional perlu dilakukan secara lebih substantif. Pertama, pendidikan karakter dan pendidikan kewarganegaraan harus dibuat kontekstual dengan realitas sosial siswa dan mahasiswa. Materi tentang Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan integrasi nasional perlu dikaitkan dengan kasus nyata, seperti hoaks SARA, diskriminasi, konflik komunal, dan praktik intoleransi. Dengan demikian, peserta didik tidak hanya memahami konsep, tetapi juga mampu mengambil sikap ketika menghadapi persoalan kebangsaan di kehidupan nyata. Kedua, pemerintah dan lembaga publik perlu memastikan bahwa kebijakan pembangunan benar-benar menghadirkan keadilan sosial. Identitas nasional akan lebih kuat apabila warga merasa negara hadir secara adil tanpa membedakan latar belakang suku, agama, kelas sosial, atau wilayah. Kebijakan yang sensitif terhadap keberagaman dapat mengurangi kecemburuan sosial dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap negara. Pada saat yang sama, penegakan hukum terhadap ujaran kebencian, diskriminasi, dan kekerasan berbasis identitas perlu dilakukan secara konsisten agar masyarakat tidak merasa bahwa konflik dapat diselesaikan melalui tekanan massa.

Ketiga, kearifan lokal perlu ditempatkan sebagai bagian dari strategi integrasi. Banyak komunitas di Indonesia memiliki mekanisme adat untuk berdamai, bermusyawarah, dan menjaga keseimbangan sosial. Nilai lokal seperti gotong royong, musyawarah, tepa salira, dan penghormatan terhadap tamu dapat dipadukan dengan nilai modern seperti hak asasi manusia, kesetaraan warga negara, dan demokrasi. Dengan sinergi tersebut, identitas nasional tidak terasa jauh dari kehidupan masyarakat, melainkan hadir dalam praktik sosial yang dekat dengan pengalaman sehari-hari.

Kesimpulan dan Saran

Dinamika identitas nasional Indonesia menunjukkan bahwa persatuan tidak dapat dianggap sebagai sesuatu yang otomatis. Keberagaman memang menjadi kekayaan bangsa, tetapi juga dapat menjadi sumber konflik apabila tidak dikelola secara adil dan inklusif. Identitas nasional berfungsi sebagai ruang bersama yang menyatukan warga

negara di tengah perbedaan. Akan tetapi, ruang bersama tersebut terus diuji oleh globalisasi, ketimpangan sosial, polarisasi politik, serta politisasi identitas yang dapat memperlebar jarak antarkelompok. Karena itu, integrasi nasional harus dipahami bukan hanya sebagai proyek formal negara, tetapi juga sebagai proses sosial yang melibatkan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Penguatan identitas nasional perlu diarahkan pada pengamalan nilai Pancasila secara nyata. Pendidikan kewarganegaraan, pendidikan karakter, moderasi beragama, dialog antarbudaya, dan literasi digital perlu diperkuat agar generasi muda mampu memahami perbedaan secara dewasa.

Selain itu, pemerintah perlu memperkuat kebijakan publik yang berkeadilan, terutama dalam pemerataan pendidikan, ekonomi, dan pelayanan sosial. Tanpa keadilan sosial, ajakan persatuan akan mudah dipandang sebagai slogan yang jauh dari pengalaman masyarakat. Sebagai saran, lembaga pendidikan perlu menjadikan isu konflik horizontal, toleransi, dan identitas nasional sebagai bahan pembelajaran yang dekat dengan realitas mahasiswa. Pemerintah dan masyarakat juga perlu memperluas ruang perjumpaan lintas kelompok, baik melalui kegiatan budaya, forum warga, organisasi kepemudaan, maupun media digital yang sehat. Dengan cara tersebut, identitas nasional Indonesia dapat terus dirawat sebagai identitas yang inklusif, adil, dan hidup di tengah keberagaman.

Daftar Pustaka

- Alim, S. (2025). Globalisasi dan pendidikan kewarganegaraan: Menyiapkan generasi cerdas dan toleran. PT Afanin Media Utama. <https://repository.uin-malang.ac.id/24010/>. (n.d.).
- Anjani, E. (2025). Identitas nasional dalam dinamika globalisasi dan tantangan integrasi nasional di Indonesia. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 3(5), 806-811. <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/article/view/15453>
- Arifin, F., Tedjabuwana, R., Wiyono, S., & Abdullah, M. K. bin. (2025). Indonesia's identity politics and populism: Disruption to national cohesion. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 22(1), 166-175. <https://doi.org/10.21831/jc.v22i1.1291>
- Faslah, R. (2024). Identitas nasional, geostrategi, dan geopolitik: Membangun keberlanjutan dan kedaulatan. PT Literasi Nusantara Abadi Grup. <https://repository.uin-malang.ac.id/20872/>
- Faslah, R. (2025). Pancasila sebagai dasar negara dan panduan hidup berbangsa. UIN Malang Press. <https://repository.uin-malang.ac.id/24376/>
- Hasba, I. B. (2025). Pendidikan kewarganegaraan. UIN Maliki Press. <https://repository.uin-malang.ac.id/26058/>
- Khasani, F. (2021). Etika berbhineka: Belajar membangun kesadaran multikulturalisme dari Nabi dan para Wali. *Jurnal Dinamika Penelitian: Media Komunikasi Sosial Keagamaan*, 21(2), 247-271. <https://repository.uin-malang.ac.id/9978/>
- Putri, V. F. A., Pratiwi, I. H., & Hidayatullah, A. D. (2025). Kritisisme konstruktif dan dialog antar generasi: Mewujudkan Pancasila yang relevan di era globalisasi. *ARemben: Jurnal Pengabdian Multidisiplin*, 3(1), 25-34. <https://doi.org/10.69688/aremben.v3i1.117>

- Umar, M. (2022). Pendidikan kewarganegaraan berbasis multikultural dalam meneguhkan identitas nasional di era disrupsi (Laporan penelitian). Repository Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. <http://repository.uin-malang.ac.id/11452/>
- Zuhroh, N., Rahmaniah, A., Nulinnaja, R., & Achmad, I. L. R. (2024). Model implementasi moderasi beragama di daerah berbatasan sebagai upaya memperkuat patriotisme dan ketahanan nasional gen z (Laporan penelitian). LP2M UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. <https://repository.uin-malang.ac.id/22535/>